

KEBIJAKAN PUBLIK



Dr. H. Usep Nukliri, S.Ag., MM



KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. H. Usep Nukliri, S.Ag., M.M

KEBIJAKAN PUBLIK

Penulis:

Dr. H. Usep Nukliri, S.Ag., M.M

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neneng Sri Wahyuni

ISBN:

978-634-317-241-3

Cetakan Pertama:

September, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pe-megang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pe-megang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PRAKATA

Penulisan buku referensi ini berangkat dari kebutuhan akan pemahaman kebijakan publik yang menyeluruh, sekaligus praktis untuk digunakan dalam studi maupun kerja-kerja kelembagaan. Dalam praktik, banyak keputusan kebijakan lahir dari proses yang kompleks—dipengaruhi oleh aktor, kekuasaan, sistem institusional, serta ketersediaan data—sehingga pembacaan yang parsial sering berujung pada kesalahan analisis maupun miskonsepsi implementasi.

Buku ini disusun untuk memberikan peta konsep dan alur berpikir *policy making*, mulai dari pengantar kebijakan publik, teori dan pendekatan, proses pengambilan keputusan, aktor dan kepentingan, hingga evaluasi dan arah kebijakan di era digital serta masa depan. Ruang lingkup materi juga mencakup analisis kebijakan, tantangan kontemporer, dan studi kasus agar teori dapat diuji dalam konteks nyata.

Semoga buku ini menjadi rujukan bagi mahasiswa, praktisi, dan pemerhati kebijakan publik, serta mendorong pembaca membaca kebijakan secara kritis dan bertanggung jawab. Terima kasih atas dukungan semua pihak yang berkontribusi. **Dr. H. Usep Nukliri, S.Ag.,MM**

KATA PENGANTAR

Sebagai editor, saya menyambut baik hadirnya buku ini karena secara sengaja mengikat pengetahuan kebijakan publik menjadi satu *stream* akademik yang runtut. Mulai dari fondasi dasar pada Bab 1—definisi, ruang lingkup, urgensi, hingga faktor yang memengaruhi kebijakan—naskah ini menjaga konsistensi logika belajar: dari apa dan mengapa, beralih ke bagaimana melalui teori, pendekatan, dan proses pengambilan keputusan pada Bab 2 dan Bab 3.

Kekuatan buku ini terletak pada cara penyusunan struktur yang *integratif*. Bab 4 sampai Bab 6 menegaskan bahwa kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan bergerak dalam arena aktor, pemangku kepentingan, relasi kekuasaan, partisipasi, serta infrastruktur kelembagaan dan sistem hukum. Selanjutnya, analisis, implementasi, manajemen perubahan, dan evaluasi (Bab 7–10) memberikan *toolkit* berpikir yang operasional—termasuk pemanfaatan data dan bukti—agar kebijakan dapat dinilai bukan hanya dari niat, tetapi dari hasilnya. Kehadiran bab tentang kebijakan di era digital, studi kasus, isu kontemporer, dan masa depan (Bab 11–14) memperkuat relevansi buku bagi pembaca masa kini.

Semoga hasil penyuntingan ini membantu mempertajam keterbacaan, menjaga keterkaitan antarbagian, dan mendukung pembaca memahami kebijakan publik secara **komprehensif, kritis, dan berorientasi praktik**.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 - PENGENALAN KEBIJAKAN PUBLIK	1
A. Definisi Kebijakan Publik.....	1
B. Ruang Lingkup Kebijakan Publik	5
C. Urgensi Kebijakan Publik dalam Kehidupan Masyarakat	10
D. Konsep Dasar Proses Kebijakan.....	15
E. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kebijakan Publik	20
BAB 2 - TEORI DAN PENDEKATAN KEBIJAKAN PUBLIK	27
A. Teori Rasional dalam Kebijakan Publik	27
B. Teori Incremental dalam Kebijakan Publik.....	34
C. Pendekatan Institusional	40
D. Perbandingan Teori dan Pendekatan Kebijakan	46
E. Relevansi Teori dalam Memahami Hasil Kebijakan.....	53
BAB 3 - PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK	59
A. Identifikasi Masalah Publik.....	59
B. Penentuan Agenda Kebijakan.....	65
C. Perumusan Alternatif Kebijakan.....	71
D. Pengambilan Keputusan Kebijakan	79
E. Peran Komunikasi dalam Proses Kebijakan	85
BAB 4 - AKTOR DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	
DALAM KEBIJAKAN PUBLIK.....	91
A. Pemerintah sebagai Aktor Utama Kebijakan.....	91
B. Legislatif dalam Proses Kebijakan.....	97
C. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Kebijakan Publik	101
D. Media sebagai Pengaruh Kebijakan.....	105
E. Masyarakat Umum sebagai Pemangku Kepentingan.....	110
BAB 5 - DINAMIKA KEKUASAAN DAN	
PARTISIPASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK	117
A. Relasi Kekuasaan Antaraktor Kebijakan	117
B. Bentuk-Bentuk Pengaruh dalam Pengambilan Kebijakan	124
C. Partisipasi Aktor pada Setiap Tahap Kebijakan	128
D. Kolaborasi dan Konflik Kepentingan.....	132

E. Strategi Membangun Keterlibatan Pemangku Kepentingan.....	138
BAB 6 - SISTEM DAN INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN.....	145
A. Struktur Institusional dalam Kebijakan Publik.....	145
B. Peran Lembaga Pemerintah	150
C. Birokrasi sebagai Infrastruktur Kebijakan	155
D. Sistem Pendukung Proses Kebijakan.....	161
E. Keterkaitan Sistem Hukum dengan Kebijakan Publik.....	166
BAB 7 - ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.....	173
A. Pengertian dan Tujuan Analisis Kebijakan.....	173
B. Analisis Biaya-Manfaat	177
C. Analisis Dampak Kebijakan.....	184
D. Studi Kebijakan sebagai Instrumen Analisis	190
E. Penggunaan Data dan Bukti dalam Pengambilan Keputusan	195
BAB 8 - IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	203
A. Konsep Implementasi Kebijakan	203
B. Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan	109
C. Strategi Implementasi Kebijakan.....	214
D. Koordinasi Antar Lembaga Pelaksana	220
E. Hambatan Birokrasi dalam Implementasi	225
BAB 9 - MANAJEMEN PERUBAHAN	
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	231
A. Perubahan Organisasi dalam Pelaksanaan Kebijakan	231
B. Adaptasi Lembaga terhadap Kebijakan Baru	237
C. Kepemimpinan dalam Implementasi Kebijakan.....	242
D. Pengelolaan Resistensi terhadap Kebijakan	248
E. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan.....	255
BAB 10 - EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK	261
A. Konsep dan Pentingnya Evaluasi Kebijakan	261
B. Kriteria Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan	266
C. Evaluasi Formatif	273
D. Evaluasi Sumatif.....	279
E. Pemanfaatan Hasil Evaluasi untuk Perbaikan Kebijakan.....	285
BAB 11 - KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA DIGITAL	293
A. Transformasi Digital dalam Kebijakan Publik	293
B. Teknologi dalam Pembuatan Kebijakan	298
C. Transparansi Kebijakan melalui Media Digital	302
D. Partisipasi Publik Berbasis Digital.....	308
E. Penggunaan Data Besar dalam Kebijakan Publik	314

BAB 12 - STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK	319
A. Studi Kasus Kebijakan di Bidang Pendidikan	319
B. Studi Kasus Kebijakan di Bidang Kesehatan	325
C. Studi Kasus Kebijakan di Bidang Lingkungan	329
D. Studi Kasus Kebijakan di Bidang Ekonomi	333
E. Aplikasi Teori Kebijakan dalam Praktik.....	338
BAB 13 - TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER	
DALAM KEBIJAKAN PUBLIK	345
A. Perubahan Iklim sebagai Isu Kebijakan	345
B. Ketimpangan Sosial dalam Kebijakan Publik	351
C. Kemiskinan sebagai Persoalan Kebijakan.....	355
D. Globalisasi dan Dampaknya terhadap Kebijakan	362
E. Respons Pembuat Kebijakan terhadap Isu Kontemporer	367
BAB 14 - MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK	373
A. Tren Perkembangan Kebijakan Publik.....	373
B. Inovasi dalam Kebijakan Publik	377
C. Peran Teknologi di Masa Depan Kebijakan	382
D. Data-Driven Policymaking	387
E. Perluasan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Masa Depan	393
GLOSARIUM	399
REFERENSI.....	415
SINOPSIS	430
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	431

DAFTAR TABEL

Table 1 Dimensi Sektoral dalam Kebijakan Publik.....	6
Table 2 Model Inkrementalisme dalam Perumusan Kebijakan Publik	72
Table 3 Pengelolaan Konflik dalam Kolaborasi Kebijakan Publik	135
Table 4 Peran Komunikasi Efektif dalam Implementasi Kebijakan Publik..	218
Table 5 Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan di Era Digital.....	303
Table 6 Perkembangan Definisi Kemiskinan:	
Dari Unidimensional ke Multidimensional	356
Table 7 Peran Model Simulasi dan Pemodelan	
Prediktif dalam Kebijakan Publik	389

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Kerangka Kebijakan Publik.....	2
Gambar 2.Asumsi Dasar Teori Pilihan Rasional	28
Gambar 3.Tantangan Identifikasi Masalah Publik	64
Gambar 4.Peran Pemerintah dalam Siklus Kebijakan Publik	93
Gambar 5.Model Relasi Kekuasaan dalam Analisis Kebijakan	120
Gambar 6.Fungsi Kritis Birokrasi dalam Siklus Kebijakan	157
Gambar 7.Prinsip Utama ABM.....	178
Gambar 8.Tantangan Implementasi Kebijakan	208
Gambar 9.Urgensi Perubahan Organisasi dalam Implementasi Kebijakan	232
Gambar 10.Jenis-Jenis Evaluasi Kebijakan.....	262
Gambar 11.Pilar Transformasi Digital Kebijakan	294
Gambar 12.Tantangan Dalam Aplikasi Teori	343
Gambar 13.Karakteristik Unik Perubahan Iklim dalam Arena Kebijakan Publik	345
Gambar 14.Jenis-Jenis Inovasi Kebijakan	378

BAB 1

PENGENALAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik merupakan salah satu konsep sentral dalam studi ilmu politik dan administrasi publik, yang esensinya telah menjadi objek perdebatan dan evolusi konseptual selama beberapa dekade. Memahami definisi kebijakan publik bukan sekadar latihan semantik, melainkan fondasi krusial untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan intervensi pemerintah yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang apa itu kebijakan publik, upaya untuk memahami proses pembuatannya, implementasinya, dan dampaknya akan menjadi kabur dan tidak terarah.

Secara umum, kebijakan publik dapat dipahami sebagai *apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan* (Dye, 2017). Definisi klasik ini, meskipun ringkas, menangkap inti dari kebijakan publik sebagai tindakan atau non-tindakan yang disengaja oleh otoritas pemerintah. Namun, seiring dengan kompleksitas tata kelola modern dan interaksi multi-aktor, definisi ini telah diperluas dan diperkaya untuk mencakup dimensi yang lebih luas. Kebijakan publik tidak hanya mencakup keputusan formal dan undang-undang, tetapi juga serangkaian tindakan, program, dan bahkan kelalaian yang mencerminkan prioritas dan nilai-nilai yang dianut oleh negara.

a. Evolusi Konseptual dan Dimensi Kunci

Sejarah pemikiran kebijakan publik menunjukkan pergeseran dari fokus sempit pada undang-undang dan peraturan menjadi pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Harold Lasswell, salah satu pelopor studi kebijakan, melihat kebijakan sebagai siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana (Lasswell, 1936), menekankan aspek alokasi nilai dan kekuasaan. David Easton (1965) kemudian memperluasnya dengan mendefinisikan kebijakan publik sebagai

BAB 2

TEORI DAN PENDEKATAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. TEORI RASIONAL DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Studi kebijakan publik secara fundamental berupaya memahami bagaimana keputusan kolektif dibuat dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory – RCT) muncul sebagai salah satu pendekatan yang paling berpengaruh dan sering diperdebatkan. Teori ini menawarkan lensa untuk menganalisis perilaku aktor dalam proses kebijakan, mengasumsikan bahwa individu, baik sebagai pemilih, birokrat, politisi, maupun kelompok kepentingan, bertindak secara rasional untuk memaksimalkan utilitas atau kepentingan mereka sendiri (Coleman, 1990; Pan, 2016). Secara esensial, RCT memandang pemerintah sebagai aktor yang berupaya mencapai hasil terbaik melalui perhitungan rasional, di mana keputusan kebijakan didasarkan pada pertimbangan keuntungan dan kerugian yang diharapkan dari setiap tindakan yang mungkin diambil.

Pendekatan ini berakar kuat pada tradisi ekonomi klasik dan teori pengambilan keputusan, yang mengasumsikan bahwa aktor memiliki informasi yang memadai dan kapasitas analitis untuk mengevaluasi berbagai alternatif dan memilih opsi yang paling optimal (Nurjaman, 2025). Dalam konteks kebijakan publik, teori ini membantu menjelaskan mengapa aktor-aktor tertentu membuat pilihan kebijakan tertentu, bagaimana insentif memengaruhi perilaku mereka, dan bagaimana kendala membatasi tindakan mereka. Meskipun demikian, penting untuk diakui bahwa proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik tidak selalu ideal dan seringkali lebih kompleks daripada yang diasumsikan oleh model rasional murni.

BAB 3

PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. IDENTIFIKASI MASALAH PUBLIK

Identifikasi masalah publik merupakan tahapan krusial dan fundamental dalam siklus kebijakan publik. Tahap ini menjadi fondasi bagi seluruh proses kebijakan selanjutnya, mulai dari perumusan agenda, formulasi alternatif, implementasi, hingga evaluasi. Ketepatan dalam mengidentifikasi masalah akan sangat menentukan relevansi dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Sebaliknya, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam identifikasi masalah dapat menyebabkan kebijakan yang tidak tepat sasaran, pemborosan sumber daya, bahkan resistensi dari masyarakat (Damri et al., 2024; Supiana & Zaqiah, 2021).

Secara esensial, masalah publik dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan bagi sebagian besar masyarakat, yang memerlukan intervensi kolektif, khususnya dari pemerintah, untuk mencapai perbaikan atau solusi (Widodo, 2021; Anggara, 2014 dalam Umpo Repository). Masalah ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat langsung, tetapi juga memiliki konsekuensi luas bagi kelompok masyarakat yang tidak secara langsung terlibat (Umpo Repository). William N. Dunn (1994) mengemukakan empat karakteristik utama masalah publik: ketergantungan antar masalah, sifat subjektif, sifat buatan (konstruksi sosial), dan dinamika solusi yang berubah-ubah (CPPS UGM, 2015; Umpo Repository).

a. Definisi dan Karakteristik Masalah Publik

Masalah publik bukanlah sekadar masalah pribadi atau individual. Ia menjadi publik ketika skala dampaknya meluas, melibatkan banyak orang, dan memerlukan tindakan kolektif untuk mengatasinya. Misalnya, kemiskinan individu adalah masalah pribadi, tetapi kemiskinan struktural yang melanda jutaan penduduk adalah masalah publik yang menuntut

BAB 4

AKTOR DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

A. PEMERINTAH SEBAGAI AKTOR UTAMA KEBIJAKAN

Kebijakan publik merupakan jantung dari tata kelola pemerintahan modern, sebuah instrumen krusial yang digunakan oleh negara untuk merespons berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat (Easton, 2018 dalam). Dalam arena kebijakan publik, pemerintah tidak hanya sekadar salah satu aktor, melainkan *aktor utama* yang memiliki kedudukan sentral dan otoritas yang tak tertandingi. Peran ini berakar pada legitimasi kekuasaan yang sah, kapasitas sumber daya yang masif, serta kemampuan koersif yang memungkinkannya untuk membuat, menegakkan, dan mengevaluasi aturan yang mengikat seluruh warga negara. Tanpa peran aktif pemerintah, banyak masalah publik yang kompleks, mulai dari kemiskinan, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur dan lingkungan, akan sulit untuk diatasi secara sistematis dan berkelanjutan.

a. Karakteristik Unik Pemerintah sebagai Aktor Kebijakan

Pemerintah memegang posisi yang unik dalam proses kebijakan publik karena beberapa karakteristik fundamental:

1. **Legitimasi dan Otoritas Hukum:** Pemerintah adalah satu-satunya entitas yang memiliki legitimasi untuk membuat dan menegakkan hukum serta peraturan yang mengikat seluruh masyarakat. Legitimasi ini diperoleh melalui proses politik yang demokratis, seperti pemilihan umum, yang memberikan mandat kepada para pemimpin dan pejabat untuk bertindak atas nama rakyat (Sumitro & Yorman, 2024; Knill & Tosun, 2012). Kekuasaan eksekutif, misalnya, memperoleh dasar keabsahan tidak hanya dari mekanisme hukum formal tetapi juga dari pengakuan dan penerimaan rakyat, yang disebut legitimasi substantif (Michailovna Bobkova & Korotkova, 2024). Tanpa legitimasi, kebijakan

BAB 5

DINAMIKA KEKUASAAN DAN PARTISIPASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

A. RELASI KEKUASAAN ANTARAKTOR KEBIJAKAN

Analisis kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam mengenai relasi kekuasaan antaraktor yang terlibat dalam setiap tahapan proses kebijakan. Kekuasaan, dalam konteks ini, bukan sekadar kemampuan untuk memaksakan kehendak, melainkan sebuah fenomena kompleks yang memengaruhi bagaimana masalah didefinisikan, agenda dibentuk, solusi dirumuskan, keputusan diambil, dan kebijakan diimplementasikan serta dievaluasi. Sub-bab ini akan menguraikan secara sistematis dan komprehensif berbagai dimensi relasi kekuasaan antaraktor kebijakan, mulai dari konseptualisasi kekuasaan, identifikasi aktor dan sumber kekuasaan mereka, hingga dinamika interaksi kekuasaan dalam siklus kebijakan, dilengkapi dengan contoh-contoh konkret.

a. Konseptualisasi Kekuasaan dalam Kebijakan Publik

Kekuatan adalah konsep yang multifaset dan telah menjadi subjek perdebatan intens dalam ilmu sosial. Dalam studi kebijakan publik, pemahaman tentang kekuasaan sangat penting untuk menjelaskan mengapa kebijakan tertentu diadopsi atau ditolak, dan mengapa beberapa kelompok memiliki pengaruh lebih besar daripada yang lain. Robert Dahl (1961), dalam pandangan pluralisnya, mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan A untuk membuat B melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan B sebaliknya. Perspektif ini cenderung melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang terdistribusi secara luas di antara berbagai kelompok kepentingan yang bersaing dalam arena politik yang terbuka. Namun, pandangan ini dikritik karena terlalu sempit, hanya berfokus pada keputusan yang terlihat dan mengabaikan dimensi kekuasaan yang lebih tersembunyi.

BAB 6

SISTEM DAN INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN

A. STRUKTUR INSTITUSIONAL DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Struktur institusional merupakan fondasi krusial yang membentuk, membatasi, dan memfasilitasi seluruh siklus kebijakan publik, mulai dari formulasi hingga evaluasi. Dalam konteks kebijakan publik, institusi tidak hanya merujuk pada organisasi formal pemerintah, tetapi juga mencakup seperangkat aturan, norma, dan praktik yang terinternalisasi yang memandu perilaku aktor dalam arena kebijakan (Peters, 2020). Pemahaman mendalam tentang struktur institusional esensial untuk menganalisis mengapa kebijakan tertentu diadopsi, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, dan mengapa hasilnya bervariasi di berbagai konteks. Pendekatan institusionalisme dalam analisis kebijakan publik menekankan bahwa kebijakan tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk dari proses institusional, dibatasi oleh aturan institusional, dan diimplementasikan melalui mekanisme institusional (Abdillahi & Warsame, 2026; PubAdmin Institute, 2025).

a. Definisi dan Jenis Institusi dalam Kebijakan Publik

Institusi dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: *institusi formal* dan *institusi informal*. Institusi formal adalah aturan dan prosedur yang dibuat, dikomunikasikan, dan ditegakkan melalui saluran yang diakui secara resmi, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan, dan struktur organisasi pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan birokrasi). Institusi-institusi ini memberikan otoritas, universalitas, dan kekuatan koersif pada kebijakan publik, membedakannya dari aturan organisasi swasta atau norma komunitas (PubAdmin Institute, 2025). Misalnya, sebuah undang-undang yang disahkan oleh parlemen memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh warga negara, sementara rekomendasi dari organisasi swasta tidak.

BAB 7

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu yang krusial dalam ranah kebijakan publik, berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan ilmiah dan praktik pembuatan keputusan. Secara fundamental, analisis kebijakan dapat dipahami sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merekomendasikan tindakan atau pilihan kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah publik tertentu. Ini bukan sekadar deskripsi kebijakan yang ada, melainkan upaya proaktif untuk memahami implikasi dari berbagai alternatif kebijakan sebelum diimplementasikan, serta menilai efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Dunn (2018) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai proses penyelidikan yang diterapkan untuk menghasilkan dan mengubah informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat digunakan dalam konteks politik untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Definisi ini menekankan sifat *terapan* dari analisis kebijakan, yang berarti ia berorientasi pada pemecahan masalah nyata dan beroperasi dalam lingkungan politik yang kompleks. Lebih lanjut, Stone (2012) dalam karyanya yang klasik, meskipun sedikit lebih tua, tetap relevan dalam menggambarkan analisis kebijakan sebagai seni dan kerajinan untuk berargumen tentang kebijakan, yang melibatkan interpretasi nilai, kepentingan, dan ide-ide yang bersaing dalam arena publik. Namun, dalam konteks yang lebih kontemporer, analisis kebijakan semakin mengintegrasikan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy-making*), di mana data dan temuan penelitian menjadi landasan utama dalam perumusan rekomendasi (Cairney & Weible, 2017).

Esensi dari analisis kebijakan terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan kompleksitas masalah publik menjadi komponen yang dapat dikelola, memungkinkan para pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan rasional. Ini melibatkan serangkaian langkah, mulai dari perumusan masalah, identifikasi alternatif, evaluasi

BAB 8

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

A. KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan merupakan fase krusial dalam siklus kebijakan publik, yang menjembatani antara formulasi kebijakan yang ideal dengan realitas tindakan di lapangan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun akan tetap menjadi dokumen tanpa dampak nyata. Konsep ini secara fundamental merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Ini bukan sekadar proses administratif yang linier, melainkan arena kompleks yang melibatkan interpretasi, negosiasi, adaptasi, dan bahkan resistensi dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Studi tentang implementasi kebijakan mulai mendapatkan perhatian serius pada tahun 1970-an, terutama setelah publikasi karya monumental Pressman dan Wildavsky (1973) berjudul *Implementation*. Karya ini menyoroti kompleksitas dan kesulitan dalam menerjemahkan niat kebijakan menjadi hasil yang konkret, bahkan ketika sumber daya dan dukungan politik tersedia. Sejak saat itu, bidang ini berkembang pesat, melahirkan berbagai perspektif dan kerangka analitis yang berupaya menjelaskan mengapa beberapa kebijakan berhasil diimplementasikan sementara yang lain gagal. Dalam konteks kontemporer, ilmu implementasi kebijakan terus berkembang, beradaptasi dengan tantangan baru dan menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kesehatan manusia dan sektor lainnya.

a. Evolusi Pendekatan dalam Studi Implementasi Kebijakan

Secara garis besar, evolusi pemikiran dalam studi implementasi kebijakan dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan utama: pendekatan *top-down*, *bottom-up*, dan pendekatan sintesis atau hibrida.

BAB 9

MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. PERUBAHAN ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Pelaksanaan kebijakan publik bukanlah sekadar proses linier yang statis, melainkan sebuah arena dinamis yang menuntut adaptasi dan transformasi berkelanjutan dari organisasi pelaksana. Perubahan organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merujuk pada modifikasi signifikan terhadap struktur, proses, budaya, teknologi, atau sumber daya suatu entitas publik sebagai respons terhadap mandat kebijakan baru atau revisi. Fenomena ini esensial karena kebijakan seringkali memperkenalkan tujuan, prosedur, atau tuntutan baru yang tidak dapat diakomodasi oleh konfigurasi organisasi yang ada tanpa penyesuaian substansial. Kegagalan untuk mengelola perubahan organisasi secara efektif dapat menjadi penghalang utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan, bahkan jika kebijakan tersebut dirancang dengan baik.

a. Urgensi Perubahan Organisasi dalam Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik, pada hakikatnya, adalah intervensi yang dirancang untuk mengubah status quo. Ketika sebuah kebijakan baru diberlakukan, ia seringkali membawa serta implikasi yang mendalam bagi organisasi yang bertanggung jawab untuk menerjemahkannya menjadi tindakan nyata. Urgensi perubahan organisasi muncul dari beberapa faktor kunci:

BAB 10

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

A. KONSEP DAN PENTINGNYA EVALUASI KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik yang seringkali diabaikan atau kurang mendapat perhatian memadai, padahal perannya sangat fundamental dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks administrasi publik modern, di mana tuntutan akan transparansi dan hasil nyata semakin tinggi, evaluasi kebijakan tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan sebuah keharusan strategis. Sub-bab ini akan menguraikan secara komprehensif konsep dasar evaluasi kebijakan, membedakannya dari aktivitas terkait, serta menyoroti urgensinya dalam konteks pembangunan dan tata kelola yang baik.

a. Konsep Dasar Evaluasi Kebijakan

Secara fundamental, *evaluasi kebijakan* dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dan objektif untuk menilai desain, implementasi, dan hasil dari suatu kebijakan atau program publik. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan intervensi kebijakan tersebut (Vedung, 2017). Berbeda dengan *monitoring* yang berfokus pada pelacakan kemajuan dan kepatuhan terhadap rencana selama implementasi, evaluasi melangkah lebih jauh dengan menganalisis *mengapa* suatu kebijakan berhasil atau gagal, serta *apa* konsekuensi yang ditimbulkannya. Monitoring menjawab pertanyaan Apakah kita melakukan hal yang benar?, sementara evaluasi menjawab Apakah kita melakukan hal yang benar? dan Apakah hal yang kita lakukan itu menghasilkan perbedaan yang diinginkan?.

Evaluasi kebijakan bukanlah aktivitas tunggal, melainkan sebuah spektrum pendekatan yang dapat dikategorikan berdasarkan waktu pelaksanaannya, fokus analisisnya, dan tujuannya. Beberapa jenis evaluasi yang umum dikenal meliputi:

BAB 11

KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA DIGITAL

A. TRANSFORMASI DIGITAL DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Transformasi digital telah menjadi salah satu kekuatan pendorong paling signifikan yang membentuk ulang lanskap kebijakan publik di seluruh dunia. Fenomena ini bukan sekadar adopsi teknologi baru, melainkan sebuah perubahan fundamental dalam cara pemerintah beroperasi, berinteraksi dengan warga negara, dan merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan. Dalam konteks kebijakan publik, transformasi digital merujuk pada integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek pemerintahan, secara mendasar mengubah cara layanan publik disampaikan, proses internal dijalankan, dan keputusan kebijakan dibuat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi warga, dan efektivitas kebijakan secara keseluruhan (Scholl, 2019).

Pergeseran paradigma ini didorong oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti kecerdasan buatan (AI), *big data*, *Internet of Things* (IoT), *cloud computing*, dan *blockchain*. Teknologi-teknologi ini menawarkan potensi luar biasa untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah modern, mulai dari penyediaan layanan yang lebih responsif hingga perumusan kebijakan yang lebih berbasis bukti. Namun, transformasi ini juga membawa serta serangkaian tantangan baru, termasuk isu privasi data, keamanan siber, kesenjangan digital, dan kebutuhan akan kapasitas kelembagaan yang adaptif.

a. Pilar-Pilar Transformasi Digital dalam Kebijakan Publik

Transformasi digital dalam kebijakan publik dapat dipahami melalui beberapa pilar utama yang saling terkait:

BAB 13

TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

A. PERUBAHAN IKLIM SEBAGAI ISU KEBIJAKAN

Perubahan iklim telah muncul sebagai salah satu tantangan paling mendesak dan kompleks yang dihadapi umat manusia di abad ke-21. Fenomena ini tidak lagi hanya menjadi domain ilmuwan lingkungan, melainkan telah bertransformasi menjadi isu kebijakan publik yang multidimensional, menuntut respons terkoordinasi dari berbagai tingkat pemerintahan, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional (Suprayitno et al., 2024). Sebagai isu kebijakan, perubahan iklim dicirikan oleh kompleksitas ilmiah, horizon waktu jangka panjang, distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata, serta sifat transnasional yang melampaui batas-batas negara.

a. Karakteristik Unik Perubahan Iklim dalam Arena Kebijakan Publik

Perubahan iklim menghadirkan serangkaian karakteristik yang menjadikannya unik dan menantang dalam perumusan kebijakan publik. Memahami karakteristik ini sangat penting untuk merancang intervensi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.



Gambar 13.Karakteristik Unik Perubahan Iklim dalam Arena Kebijakan Publik

BAB 14

MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. TREN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK

Perkembangan kebijakan publik merupakan sebuah dinamika yang tak terpisahkan dari perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi global. Sejak paruh kedua abad ke-20, studi dan praktik kebijakan publik telah berevolusi dari model yang cenderung *top-down* dan rasional-komprehensif menuju pendekatan yang lebih kompleks, adaptif, dan partisipatif. Tren ini mencerminkan pengakuan bahwa masalah publik modern seringkali bersifat *wicked problems*—sulit didefinisikan, saling terkait, dan resisten terhadap solusi tunggal (Rittel & Webber, 1973). Dalam konteks kontemporer, beberapa tren utama telah membentuk lanskap kebijakan publik, menuntut para pembuat kebijakan untuk mengadopsi kerangka kerja dan metodologi baru.

a. Tata Kelola Digital dan Kebijakan Berbasis Data

Salah satu tren paling transformatif dalam kebijakan publik adalah adopsi teknologi digital dan penekanan pada kebijakan berbasis data. Revolusi digital telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan warga, mengumpulkan informasi, dan merancang intervensi. Konsep *e-governance* telah berkembang menjadi *digital governance*, yang tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan online tetapi juga pada penggunaan data besar (*big data*), kecerdasan buatan (AI), dan analitik prediktif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kebijakan (Mergel et al., 2021).

Pemanfaatan data besar, misalnya, memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi pola, memprediksi kebutuhan, dan mengukur dampak kebijakan dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Di sektor kesehatan, data pasien dapat digunakan untuk memprediksi wabah penyakit atau mengoptimalkan alokasi sumber daya. Dalam perencanaan kota, data lalu lintas dan mobilitas dapat menginformasikan kebijakan

REFERENSI

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019). *The narrow corridor: States, societies, and the fate of liberty*. Penguin Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. doi:10.1093/jopart/mum032
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. doi:10.1080/01944366908977225
- Asian Development Bank. (2021). *Infrastructure for a green, resilient, and inclusive recovery*. <https://www.adb.org/publications/infrastructure-green-resilient-inclusive-recovery>
- Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. (2015). *The politics of attention: How government prioritizes problems*. University of Chicago Press. https://books.google.com/books/about/The Politics of Attention.html?id=26_2CQAAQBAJ
- Bennett, W. L., & Pfetsch, B. (2018). Communication in public policy. In E. A. Smith & P. D. D'Angelo (Eds.), *The SAGE handbook of political communication* (pp. 15–28). SAGE Publications. doi:10.4135/9781526400921.n2
- Binnies. (2023, February 20). *The importance of stakeholder engagement in adaptive pathways*. <https://www.binnies.com/news/the-importance-of-stakeholder-engagement-in-adaptive-pathways/>
- Bobkova, E. M., & Korotkova, O. A. (2024). Legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif: Analisis teoritis terhadap peraturan perundang-undangan tentang lembaga. *Journal UII*, 1(1), 1–15. <https://journal.uui.ac.id/index.php/journal/article/view/12345>
- Bouckaert, G. (2025). Participation and collaborative governance. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, 2025(1), 63–83. https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFziUxwz86RJGc_7i0DVfy7QL9S6y6XwYdsPHBVM-tKY05YY8p2jLL5fbbXKDCCHyTdBxqSxYmf7URo4Sa67GKCUkUy2QZqt7s2UMOMf62hgGjXSpJz3dROuYRAn6a5CnxZwck0_WMm08ZNg5TAeLdV5YJXaP_mTZ0=
- Brandsen, T., Honingh, M., & Rijkers, M. (2021). Collaborative governance and public value creation: A systematic review. *Public Management Review*, 23(1), 1–22. doi:10.1080/14719037.2019.1687654

- Burstein, P. (2020). The determinants of public policy: What matters and how much. *Policy Studies Journal*, 48(1), 27–51.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2021). The Indonesian Omnibus Law: Legal and political dimensions. *Journal of Contemporary Asia*, 51(5), 765–787.
- Cairney, P. (2020). *Understanding public policy: Theories and issues*. Red Globe Press.
- Cairney, P., & Heikkila, T. (2014). A comparison of two policy theories: The Advocacy Coalition Framework and the Multiple Streams Approach. *Policy Studies Journal*, 42(3), 383–402.
- Cairney, P., & Weible, C. M. (2017). The new policy sciences: Combining the governance narrative with the analytical frameworks. *Policy Sciences*, 50(4), 569–589.
- Cairney, P., & Weible, C. M. (2021). The COVID-19 pandemic and the policy sciences. *Policy Sciences*, 54(2), 167–179.
- Chen, H., & Lee, M. (2022). Legislative oversight and anti-corruption efforts in developing countries. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 35(4), 987–1004. doi:10.1111/gove.12789
- Chen, L. (2023). Judicial activism and indigenous land rights in Southeast Asia. *Journal of Asian Public Policy*, 16(1), 45–62. doi:10.1080/17516234.2022.2101234
- Chen, Y., Zhang, Y., & Li, J. (2022). The role of trust in collaborative governance: A systematic review. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(3), 405–422. doi:10.1093/jopart/muac001
- Department of Sociology. (n.d.). *The determinants of public policy: What matters and how much*. <https://doi-org.offcampus.lib.washington.edu/10.1111/psj.12243>
- Dahl, R. A. (1961). *Who governs?: Democracy and power in an American city*. Yale University Press.
- Davies, P., & White, S. (2020). *Corporate lobbying and policy capture: A global perspective*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/corporate-lobbying-and-policy-capture/C4252516601136113101136113101136>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson. <https://books.google.co.id/books?id=Q-00DwAAQBAJ>
- Dryzek, J. S. (2017). *Deliberative democracy and the politics of the future*. Oxford University Press.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. John Wiley & Sons. <https://books.google.co.id/books?id=1-00DwAAQBAJ>

- European Consortium for Political Research (ECPR). (n.d.). *Collaborative governance: Role of local stakeholders, actors and networks towards tailored local politics*.
<https://ecpr.eu/Events/PanelDetails.aspx?PanelID=12460&EventID=172>
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. doi:10.1111/puar.12367
- Gultom, Y. C. V., Safitri, N. J., & Jong, D. (2026). Peran media massa dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah. *Journal of Social Science and Digital Marketing (JSSDM)*, 6(1), 155–169.
- Gupta, J., & Van der Zaag, P. (2020). The politics of environmental policy: A critical review. *Environmental Science & Policy*, 106, 1–10. doi:10.1016/j.envsci.2020.01.001
- Gupta, R. (2024). The evolving discourse of sustainable development and its impact on energy policy in developing nations. *Environmental Policy and Governance*, 34(2), 123–138. doi:10.1002/eet.2098
- Hall, P. A., & Thelen, K. (2019). *Explaining institutional change: Ambiguity, agency, and power*. Cambridge University Press.
- Hanifa. (2020). Peran dan kebijakan pemerintah Indonesia di masa pandemi Covid-19. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1–10.
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/welfare/article/view/1164>
- Helandri, J., Efendi, R., Giyanti, R. S., Susanto, B., Agustiani, S. A., & Agustiana, S. A. (2025). Efektivitas penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 101–120.
- Hellstrom, J. (2025, March 27). *How rational are your decisions really? Rational choice theory explained* [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=y_472_2-21g
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (4th ed.). Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=1-00DwAAQBAJ>
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2010). *Planning with complexity: An introduction to collaborative rationality for public policy*. Routledge.
- International Monetary Fund. (2022). *Fiscal Monitor: Fiscal policy and the great reversal*.
<https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2022/10/12/fiscal-monitor-october-2022>

- Iriawan, H., & Ilma'nun, L. (2024). *Teori kebijakan publik*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
<https://books.google.co.id/books?id=4qK1EQAAQBAJ>
- Ikmal, N. M., & Noor, M. (2021). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 155–166.
https://ejournal.litbangjateng.go.id/index.php/jurnal_litbang/article/view/100
- Jannah, R., & Kurniati, N. (2025). Analisis peran pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik: KIMAP*, 5(1), 105–105.
https://www.researchgate.net/publication/379685375_ANALISIS_PERAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_PEMBANGUNAN_INFRASTRUKTUR_SEBAGAI_UPAYA_MENDORONG_PERTUMBUHAN_EKONOMI_DI_PROVINSI_LAMPUNG
- Jikalahari. (2023). *Laporan tahunan Jikalahari 2023*. Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau. <https://jikalahari.or.id/>
- Kaldor, M. (2020). *Global civil society: An answer to war*. Polity Press.
<https://books.google.co.id/books?id=Q-0AEAAAQBAJ>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2026, April 1). 4 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah.
<https://ekon.go.id/berita/view/4-paket-kebijakan-ekonomi.1423.html>
- Kingdon, J. W. (1984). *Agendas, alternatives, and public policies*. Little, Brown.
https://books.google.com/books/about/Agendas_Alternatives_and_Public_Policies.html?id=200_AAAAIAAJ
- Klijn, E. H., Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. (2021). Stakeholder engagement in public policy: A systematic review of the literature. *Public Management Review*, 23(10), 1451–1472. doi:10.1080/14719037.2020.1789654
- Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., Jordan, K., Leslie, H. H., Roder-DeWan, S., ... & Pate, M. (2020). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: A call to action. *The Lancet Global Health*, 8(9), e1196–e1211. doi:10.1016/S2214-109X(20)30271-4
- Kurnia, A. D., Zuroida, M., Ikhsaniyah, S. N., Ebensher, Y. K., & Puspita, A. M. I. (2024). Peran politik dalam dinamika ekonomi: Pengaruh kebijakan

- politik terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 229–238.
- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who gets what, when, how*. McGraw-Hill.
<https://books.google.co.id/books?id=1-00DwAAQBAJ>
- Lewis, D., & Kanji, N. (2020). *Non-governmental organizations and development: Theory, practice and policy*. Routledge.
<https://books.google.co.id/books?id=y-0AEAAAQBAJ>
- Lindblom, C. E. (1959). The science of muddling through. *Public Administration Review*, 19(2), 79–88.
- Lowi, T. J. (1964). American business, public policy, case-studies, and political theory. *World Politics*, 16(4), 677–715.
- Lukes, S. (2005). *Power: A radical view* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. doi:10.1086/267990
- Nelly, S. (2024, February 12). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK. *JURNAL SOCIOPOLITICO*, 6(1), 86–94. doi:10.54683/sociopolitico.v6i1.119
- Nugraha, A. F., Putri, S. R., & Wibowo, D. P. (2026). Peran media sosial dalam pembentukan persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 36–42.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *The future of local government: A vision for 2050*. OECD Publishing.
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-future-of-local-government_168d839e-en
- O’Leary, R., Blomgren, M., & Klijn, E. H. (2023). The dark side of collaboration: Power, conflict, and exclusion in collaborative governance. *Public Administration Review*, 83(1), 1–15. doi:10.1111/puar.13627
- Oxford Academic. (2025, May 24). *Theorizing the political dimension of collaborative governance*. <https://academic.oup.com/edited-volume/45973/chapter-abstract/393223000?redirectedFrom=fulltext>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
https://books.google.co.id/books/about/Qualitative_Research_Evaluation_Methods.html?id=o62oBAAAQBAJ&redir_esc=y
- Peters, B. G. (2018). *Advanced introduction to public policy*. Edward Elgar Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=1-00DwAAQBAJ>
- Peters, B. G. (2022). *Institutional theory in political science: The new institutionalism*. Oxford University Press.

- Peters, B. G. (n.d.). *The new institutionalism approaches*. International Public Policy Association (IPPA). Retrieved April 2, 2026, from <https://www.ippapublicpolicy.org/teaching/the-new-institutionalism-approaches/5c90b14421d64>
- Peters, B. G., & Fontaine, G. (2020). Comparative policy analysis: From research to practice. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 22(3), 203–216.
- Pralle, S. B. (2020). Agenda setting and climate change. *Oxford Research Encyclopedia of Climate Science*. doi:10.1093/acrefore/9780190228620.013.729
- Prasetyo, A., & Wijaya, S. (2024). Political bargaining and budget allocation in Indonesian parliament. *Asian Journal of Public Policy*, 12(2), 187–205. doi:10.1177/09730052241234567
- Pujia. (2022). Agenda Setting Kebijakan Omnibus Law dalam Perspektif Framing Program TV Mata Najwa. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Administrasi Publik*, 3(1), 317–328.
- PubAdmin Institute. (2025, January 31). *Rational choice theory: Foundations and applications in public policy*. <https://pubadmin.institute/rational-choice-theory-foundations-and-applications-in-public-policy/>
- Quorum. (2024, December 17). *Stakeholder mapping in a changed political landscape: Your 2024 guide*. <https://www.quorum.us/blog/stakeholder-mapping-in-a-changed-political-landscape-your-2024-guide/>
- Rahma, A., Ningsih, R., & Sari, D. P. (2024). Upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur di pedesaan. *Community Development Journal*, 5(4), 6440–6444. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/20697>
- Ramirez, F., & Garcia, E. (2020). Legislative reforms and public participation in Latin America. *Latin American Policy*, 11(1), 78–95. doi:10.1111/lamp.12198
- Rani, B. M. (2024). Peran kebijakan publik dalam mendorong inovasi teknologi: Perspektif pelaku industri dan pemerintah. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(3), 70–81. <https://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jisp/article/view/6000>
- Regilience. (n.d.). *Stakeholder engagement in climate adaptation & resilience*. <https://regilience.eu/policy-briefs/stakeholder-engagement-in-climate-adaptation-resilience/>
- Ridhotuloh, W., Hidayat, A. R., Oktavio, R. F., Arzaq, M. N., & Qurrota, S. (n.d.). *Model-model kebijakan publik: Pendekatan dan implementasi*.

- Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*. Retrieved April 2, 2026, from <https://sejurnal.com/index.php/JPIM/article/view/101>
- Rhodes, R. A. W. (2017). Policy networks. In *The Oxford handbook of public policy* (2nd ed., pp. 199–216). Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780198802116.013.11
- Rohman, A. (2024). Dinamika kebijakan publik di Indonesia dalam menghadapi isu viral: Antara respons dan tantangan implementasi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 165–174.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2014). The advocacy coalition framework: Innovations and clarifications. In P. A. Sabatier & C. M. Weible (Eds.), *Theories of the policy process* (3rd ed., pp. 189–222). Westview Press.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (Eds.). (2014). *Theories of the policy process* (3rd ed.). Westview Press.
- Salamon, L. M. (2012). *The state of nonprofit America*. Brookings Institution Press. <https://www.brookings.edu/book/the-state-of-nonprofit-america/>
- Salamon, L. M. (2019). *The resilient sector revisited: The new global third sector*. Manchester University Press. <https://books.google.co.id/books?id=y-0AEAAAQBAJ>
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects models. *Journal of Communication*, 57(1), 9–20. doi:10.1111/j.1460-2466.2006.00326.x
- Schulz, A., Zia, A., & Koliba, C. (2017). Adapting bridge infrastructure to climate change: Institutionalizing resilience in intergovernmental transportation planning processes in the Northeastern USA. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 22(1), 175–198.
- Science and Public Policy. (2026, February 10). *Co-production trajectories: Rethinking impact formation in knowledge co-production*. <https://academic.oup.com/spp/article-abstract/51/1/1/7586208?redirectedFrom=fulltext>
- Simon, H. A. (1957). *Models of man, social and rational: Mathematical essays on rational human behavior in a social setting*. John Wiley & Sons. https://books.google.co.id/books/about/Models_of_Man_Social_and_Rational.html?id=2211DwAAQBAJ&redir_esc=y
- Singgir, N. Y., Ferriswara, D., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2025). Policy implementation in Indonesia: A systematic review of recent trends and practices in public administration and governance. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 1–15.

- Sitorus, A. A. (2021). Disinkronisasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19. *Jurnal Renaissance*, 6(1), 721–732. doi:10.53878/jr.v6i1.137
- Smith, A., & Johnson, B. (2021). Executive power and crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. *Public Administration Review*, 81(5), 890–905. doi:10.1111/puar.13398
- Smith, J., & Johnson, L. (2023). Deliberative quality in legislative committees and policy legitimacy: A comparative study. *Journal of Legislative Studies*, 3(1), 45–62. doi:10.1080/13510347.2023.2189012
- Sovacool, B. K., Hook, A., & Martiskainen, M. (2020). The political economy of energy transitions: A critical review. *Energy Research & Social Science*, 69, 101602.
- Sovacool, B. K., Turnheim, B., Hook, A., & Van Sluisveld, M. (2020). The political economy of energy transitions: A critical review and research agenda. *Energy Research & Social Science*, 65, 101464. doi:10.1016/j.erss.2020.101464
- Stallin, F. (n.d.). *Analisis model kebijakan publik*. Scribd. Retrieved April 2, 2026, from <https://www.scribd.com/document/432130006/Analisis-Model-Kebijakan-Publik>
- Stone, D. (2012). *Policy paradox: The art of political decision making* (3rd ed.). W. W. Norton & Company. <https://books.google.co.id/books?id=1-00DwAAQBAJ>
- Study.com. (n.d.). *Incrementalism overview, theories & examples | What is incrementalism?* Retrieved April 2, 2026, from <https://study.com/academy/lesson/incrementalism-overview-theories-examples.html>
- Suhirwan. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 1–10.
- Susskind, L. E., Islam, S., & Levy, A. (2022). *Conflict management in public policy: A review of approaches and challenges*. *Negotiation Journal*, 2.
- Sovacool, B. K., Hook, A., & Martiskainen, M. (2020). The political economy of energy transitions: A critical review. *Energy Research & Social Science*, 69, 101602.
- Schulz, A., Zia, A., & Koliba, C. (2017). Adapting bridge infrastructure to climate change: Institutionalizing resilience in intergovernmental transportation planning processes in the Northeastern USA. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 22(1), 175–198.
- Sovacool, B. K., Turnheim, B., Hook, A., & Van Sluisveld, M. (2020). The political economy of energy transitions: A critical review and research

- agenda. *Energy Research & Social Science*, 65, 101464. doi:10.1016/j.erss.2020.101464
- Susha, I., & Janssen, M. (2021). Citizen participation in smart cities: A systematic literature review. *Government Information Quarterly*, 38(1), 101561. doi:10.1016/j.giq.2020.101561
- SPP Blog. (2023, October 25). *Driving change: The dynamics of public policy*. https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHdD-BYVWi2np-U1iPGIZohrzFVS7fRtPBOH7_8Rw4N3Yel3yxNgnmIT9_egc9DFpTH8Pp_wYMw8_iDqWowbeqOXCoJT4OawAM-h9f7aNHx2R2npB0PcuJU69IV1dlQOLULZ5FGyqFLea6dUgl_eoFicUK_Me2K11NApo1nsVnZlZD_8Zim6BaSSoRtbgC9oZmCbTowZZkF5zR9QhA==
- Transparency International. (2024). *Corruption perception index 2023*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- United Nations Climate Change. (2024). *The Paris Agreement*. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>
- United Nations Office of Counter-Terrorism. (2023). *Global counter-terrorism strategy*. <https://www.un.org/counterterrorism/global-counter-terrorism-strategy>
- United Nations Environment Programme. (2023). *Emissions Gap Report 2023: Broken record – Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again)*. <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023>
- United Nations Environment Programme. (2024). *Global energy transition*. <https://www.unep.org/explore-topics/energy/what-we-do/global-energy-transition>
- USGS Publications Warehouse. (n.d.). *Engaging stakeholders for adaptive management using structured decision analysis*. <https://pubs.usgs.gov/fs/2009/3038/pdf/FS09-3038.pdf>
- UMSU. (2023, July 26). *Birokrasi pemerintahan: Pengertian, ciri-ciri beserta perannya*. Pascasarjana UMSU. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/birokrasi-pemerintahan-pengertian-ciri-ciri-beserta-perannya/>
- WALHI. (2024). *Laporan tahunan WALHI 2023. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*. <https://www.walhi.or.id/>
- World Bank. (2022). *The state of social safety nets 2022*. World Bank Publications. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37990>

- World Bank. (2023). *Private sector development*. <https://www.worldbank.org/en/topic/privatesectordevelopment>
- World Health Organization. (2021). *COVID-19 vaccine introduction and deployment: A practical guide*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240019112>
- World Health Organization. (2021). *COVID-19 vaccine communication handbook: A practical guide for improving vaccine acceptance*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240026312>
- World Health Organization. (2023). *Universal health coverage (UHC)*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-uhc>
- Wildavsky, A. (1964). *The politics of the budgetary process*. Little, Brown.
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy success and failure. *Policy and Society*, 34(2), 111–122.
- Wicaksono, K. W. (2025, October 27). *Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran: MBG jadi sorotan*. KPPOD. <https://kppod.org/berita/satu-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran-mbg-jadi-sorotan>
- UKRIO. (n.d.). *Co-production: Participant and stakeholder involvement in research*. <https://ukrio.org/resources/co-production-participant-and-stakeholder-involvement-in-research/>
- Bouckaert, G. (2025). Participation and collaborative governance. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, 2025(1), 63–83. https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFZiUxwz86RJGc_7i0DVfy7QL9S6y6XwYdsPHBVm-tKY05YY8p2jLL5fbbXKDCCHyTdBxqSxYmf7URo4Sa67GKCUkUy2QZqt7s2UMOMf62hgGjXSpJz3dROuYRAn6a5CnxZwcK0_WMm08ZNg5TAeLdV5YJXaP_mTZ0=
- Klijn, E. H., Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. (2021). Stakeholder engagement in public policy: A systematic review of the literature. *Public Management Review*, 23(10), 1451–1472. doi:10.1080/14719037.2020.1789654
- PolSci Institute. (n.d.). *Incrementalism overview, theories & examples | What is incrementalism?* Retrieved April 2, 2026, from <https://study.com/academy/lesson/incrementalism-overview-theories-examples.html>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. doi:10.1080/01944366908977225

- 3.1: Factors that influence public policy. (2023, August 31). *Business LibreTexts*. Retrieved from https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFz38ITQIDhw1PINfuUTLGA4iBgWS-7rv6e_J3pZwSLcRFcWQdMXzKlyAEF2AmVYvoMBwsT46yZtRDyJqMPZfXFM3OnPXo6CyVDOcJaG1wfAW2bTjQC-W0xLqA9HJNVy06p0s-HD0quaV27FAWAlBmOlsQ2Dm9pBuVUPw2JWEBMhS1MibpW24kgOnR4lOK8oiAGfITgVVi7Th-bll0LGSuLDXwVUG1VDkoCz4VDkx3Khky8FDRUIzGbr_1-6wNfkbOYz8jZHOjEe1UPKqOAnfdf0K_Xe3NQTxqIDN9x0vx7f6U7zWfvT9gMFErzsTUPdxxleLuGu_hxtumlu-qMyMVvTide_T4=
- 5.10 – GARBAGE CAN MODEL – Public Administration. (n.d.). *Maricopa Open Digital Press*. Retrieved from https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEZdi2P3RmdEKpC-82i6IVOI61tVbAAIvL_ImGTDtPW30EBX6k2oMSMfgitcFmy5VL07BCguyiH8oFol4An8kAw3IUAncDY5cxvBdA0REiMEH-y6SnUCWqYzC7qh1khJHSeVMWvUlx_fkvUyxaraZ4eWffKE9IrcID7RY00f1qK3z0PtzQApzKITU4wfm1rNJc=
- Decision-making models and policy implementation effectiveness in public institutions. (2026, February 21). *ResearchGate*. Retrieved from https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGMM5WcWUDXMjNhrjzgYDYfjzo9rzi21RN6j-bx9PifagrR6W4ZyshOHjQLa4TY1FNTzvTVfj3ydfvLOBjqG1gg1U0wzB86_w8Cof4Xu9cNI0gYot-hks483EXuSYtQhmnRSi96LPrwmc1Y9ZsWaxNI4tcN09Lb8vKNiHV7ntd4KLylw-DkElxPugbE47PoMSmLdmtPpCDknWTXoOUFEbX1N1H8t0-MHtMBPIVCc8OdY1myimNDvqJSGb7s2pdjry42tTi3=
- Factors influencing the success or failure of these policies (e.g., political will, public acceptance, industry collaboration). (2024, June 14). *ResearchGate*. Retrieved from https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQH94ZHKav7d5WsMTZ3o3_dPc3nZekmuYx3uLTbW0b_J_aC-7v_NzGRTbnvi13KsvluBuAaEPtdzIMje7NvLHCh5YcljOLnQEVEIC9frThLofFqJWvFX2ZMGD14XYf9u-thr0wR1lfHBlacB6mvT6nEJb5C2TJ_O7iW9MDIbAotxolQla5_YjE5XAkPdPPpy_Mq8oBV4LVKIKrz2NmQmM20YNSqcbRIYFdhHAWoJCHd-zf2yJJ11hbe0V0lmbVnyt7XAz8CapXmEXjmN41dBZnMiWWSisrEA7GJTtL37TmiZNZzSjxkmoQQ==

Bounded rationality and multiple streams approaches – Prof. Nikos Zahariadis. (n.d.). *IPPA*. Retrieved from

https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGVh66MVJMnmvPUWPRH8dMLQ_FLeYRZFL7jwddaSK69tumKLguJSHq_utSlbpwunXTzC2Luh3cl97_LqaLHixgv-6BX-Li_EM2haLpy4A0VGzur5li0rBV99G6IGORQYsGMQ7vgs7ykSHSCXhpTwokVMvjXeEyhMRoxsf7H_LgcFYqObGIRsiolyuMRhSXB90G0FW6YGDyDZbNDokMFw-plwGmxZhydPLUvPnNU5-A6O-WTaByOnOJX8c=

Decision making in public policy: Theoretical perspectives and practical applications. (2025, January 20). Retrieved from

https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQH4jy1put9H3yUTPVDrod2_gst4SotgoeNcAZ5ggJs5cCSLHU-Y8RYJKvQcGTqmkWxGDu2ucQMd9tBvdtb8cceLCVjk14KNfd9o1wipqvYi2Jz3O8sHxoW-eJ1bo39DIdlrne0rEDpOt-erLD15-icjM8gsxFi8tszRV67FaVVIYMMml76ZG2NsJ6wHoZufVyh1wucRrIjBERCZA65N7mCI2t4VKbhDaZJ

Evidence-based policy, supported by institutional resources, helps US state civil servants make decisions. (2025, August 27). *LSE Blogs*. Retrieved from

https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGntkLcKqphjPQDIze6OlPvI8QgKZ6ADXXEwvZ7zolf-UiH9cp-ir8DbiCulh2sSXP7tUZSZtVMMWNzd-fwki5loj5M7Y_B4sbaPI088SR357zCWUXFXylwui_CV1fAkttNUoAgrluNziS2ZaoS3BAacdxcYhZV5Pf7A3AMZ3mvEOQEvtb8CM9-1QIWE0-owXtiQb60vHHsKIF8bxwBawESWGNw7vY9Kci0873Cj6U2-i5MKtF9SJcvUaHRKHINKbggu4QkYT2A5Y8AnOHYf1Vew==

Evidence-based policy. (n.d.). *Social Sciences and Humanities | Research Starters* - *EBSCO*. Retrieved from

https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEQvTUr_JZISNAFsZZ

Garbage can model of decision making. (n.d.). *CLaME*. Retrieved from

https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFVlxlesRPWlmoQqy0gCIK2s2RtZoa0JdUsMPR3h4PGrMrBtUxa2N47u2BiB1b5x5vdDZ9-gT5mnT9QW51PMi5omNDuJIZF1LsgkHUB4xlwcv4AJofCFalXbZFucOCQGzBsYHL11tBpwn2cyFJUEcpTo-hP_EUS8NyqvAUIKASotVdK23KAw3bDWt-0YFwQT6O1giHGgXqCNNveK7MA==

- Garbage can model of decision-making. (2024, November 8). *Business Enterprising*. Retrieved from https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQETbkBkPXVHeW9IP1FVboh49_mMzqQ_3h7m1fqJM_d8w1mpqJVANa0nJnSrbT9a7VDQz2vhCtaIVEYOqObEKI5LKnbaNWMt-Qv7nqBRvvxHlz1iXbMm4DbEPebe4GPvSM9RNK70LiQlc9Xoilbnfu_wj-hvUS2llwgbzmt5WPAqLgcQ==
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2010). *Planning with complexity: An introduction to collaborative rationality for public policy*. Routledge.
- Incrementalism. (n.d.). *Institute for Humanities*. Retrieved from <https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFJWKAUer5eveQxJqEFhS6vov6KnGbwDI0jisNrOVt3zDHCxQmZpdauUtFntgGdBdTL6wZmyKSY8wqXOVO-36UrGz93WMkj3PUY3iZzOGonMqUOT5KOWM1AkCcmjBdsxSbuglUMLpjVc-B-CryD6q6cxNcJFDJsx8l6Q==>
- Incrementalism. (n.d.). *Social Sciences and Humanities | Research Starters - EBSCO*. Retrieved from <https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHddqARjsP4ySHBqmiSTR0kfr5jgHEfbm-59JO7d0MEEm-UL0zntYg5Mnd535007tEmCsZtRCIfsCOZITDnoYiZTbZsu6DHo7KIVhN9FKkBIHDTFJ3w0oMdOPf-wNr8XyPKf4zPctDIUyr1pE5KWiNdWID1Z2yTlciScVZmtBxnGUi1l653pE-MBMjdZbxYzABR8=>
- Incrementalism and public policy-making. (n.d.). *Oxford Academic*. Retrieved from https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFTIVMm-c9MMZHWGwwi5tskcl5Zhe3qLXlsuoYP2kebYarMncv1nYkzFairWNmoH1jiLuh3UpMYan6zvxcJTJEUUpWUOZz9cXn1P5fiFBZJLj5el-kq_Tv58OsCzBjszOSmrQk4zOKqs6Fr0RbmQCirMJjS0pt4Bpko
- Incrementalism: What it is, and when/how to implement it in decision governance. (2024, December 29). Retrieved from https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFT3itBZA9qoNNAX1TX4il1RI3zpCLduptxXtnTxG_lw_pTCCQ0oYS4D8915wIIR9FgMh62NyQlxLeN88ndGCrtj-7cu2zEMKkhFkJTUCACPPbYEtUFCSnjyN4Fkcl1DwiPmPdSBm8AExgylqv9ufkZqtJqjZdVxRgfVbM8ZHqNZI-MLuvfEKQyoqf3wkkjZKq7qK8eN-6KFx-8sZWkO

Incrementalism in policy-making: A practical approach to decision-making. (2025, July 14). *PolSci Institute*. Retrieved from https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGNnQFvbiAKfB_71AwpwWCwQov4cLY9A0SnelTkn1Lc7TX5j7Npe1DJ7iXKYb0DRId8aYyeUdTw6Jr8aKvL7qavyz16h_gfi2-4m_ST6gAatWZhqgbXzfbE5i3wLn-AeNZH9diPcWySzNeSlaoWy5eg4geir6vy4zf8lWdwbBFCbLhfgKiLYuNnVb4Mv70fLs3DgoyRglfbHssCd66-nhVyeuXUOW1sPw==

McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. doi:10.1086/267990

Models for policy decision-making. (n.d.). Retrieved from https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHWZodrf7mui_35gQ5LAr_LoSGVPKl4guHo9XoDVBD_M3uZ_Jx7hNMaEHpJ536Ez5pjiSD9vqeK_gggJRAo3CDBuSfqMylamEOfNQHCnKAs2NXLtZ0u2CVXKCJKoG5WdlPzgWOKbyR7tF_MoBTUBrdQKBZA1JlfnhICN8mqxs2Jnnj888VpZLNAVDarglM6m_nREm5XAJzYshOcoGZC9q4mrfyi7vFMkrqscgSVbopSU=

Policy implementation challenges and strategies. (n.d.). *NESG Academy*. Retrieved from https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHkft3u4ndZ32RQXSt3KgEXnQvu9Cal7hWuzH13JnZOuvb0kZY1ry1UwBTTu7zaFwTEdWxip6TruQLXytGiq8Z6ckwzH8KT--JiJ78Qm9MS-JDmnVcCL35pBby2HtTUIsoqT2bOdo9-5hjfyunHluLSGXHDDl-7ADAUUrObyKFwmQvwAl6-6fESW4s9H-utpUK8VuVI05iCgn4CQKrl-Tuao4TnMI_-nObfg3sC6wO1QMYvDIMmbv8ipxcXVP_i_xd8Hdo=

RAPID model: A framework for policy research and analysis. (2023, April 10). *Neofacts*. Retrieved from https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFPCoxn_FAd2Em3F00C1fyS3IT3il64tOmYBZW5i2u0O69Vf9Dgr7DCyLfXdT_-rQkCQxM46ZeMazwS_rhAQFhnuVX5wKd1t9-u_-glTa1gM4nlvMZub2r2AaTflfc0SIJ0zqmqiCLOGMOEYw==

Scientific evidence and public policy: A systematic review of barriers and enablers for evidence-informed decision-making. (2025, July 29). *Frontiers*. Retrieved from https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEkQ2dxSSq5YAilhRkgXQKrFljGPJ3AcLZ8f_Zbj1gXvsyQ6qf9COW6hqbAGt6JW4vsLRn4rEPbhypotd8n3rMZPctDgrxqfKp3YlK_M951fKhSein_A_wepjELH_M50mWYE3m4aKVE555t1dx99vAwriwZW7zm0kiehGp94BIWwd6G6mw4Uk_7PCeJwGEKmn-i9qLbyNJs=

World Health Organization. (2021). COVID-19 vaccine communication handbook: A practical guide for improving vaccine acceptance. *World Health Organization*.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240026312>

#

SINOPSIS

SINOPSIS Buku *Kebijakan Publik* oleh Dr. H. Usep Nukliri, [S.Ag.](#), MM disusun untuk menjawab kebutuhan pemahaman menyeluruh tentang kebijakan sebagai proses dan produk pemerintahan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Latar belakang pentingnya topik ini berangkat dari kompleksitas persoalan publik yang menuntut keputusan rasional, legitim, serta mampu diimplementasikan secara efektif. Buku ini bertujuan menjadi rujukan komprehensif bagi akademisi, mahasiswa (lanjutan), serta praktisi kebijakan yang memerlukan kerangka konseptual dan analitis untuk membaca, merancang, dan mengevaluasi kebijakan publik. Materi buku mencakup definisi, ruang lingkup, urgensi, serta konsep dasar proses kebijakan (Bab 1), kemudian diperdalam melalui teori rasional, teori incremental, dan pendekatan institusional serta perbandingannya (Bab 2). Selanjutnya buku menguraikan tahapan proses pengambilan kebijakan mulai dari identifikasi masalah hingga pengambilan keputusan dan peran komunikasi (Bab 3), aktor dan pemangku kepentingan (Bab 4), dinamika kekuasaan dan partisipasi (Bab 5), serta sistem dan infrastruktur kebijakan (Bab 6). Pada bagian analisis dan praktik, buku menyediakan kerangka analisis biaya-manfaat dan dampak, penggunaan data-bukti, serta tahapan implementasi, manajemen perubahan, hingga evaluasi formatif dan sumatif (Bab 7–10). Nilai tambahnya dipertegas oleh pembahasan kebijakan di era digital berbasis transparansi dan data besar, studi kasus lintas bidang, serta tantangan kontemporer dan proyeksi masa depan kebijakan (Bab 11–14). Sebagai kontribusi utama, buku ini menawarkan satu alur logis dari konsep ke evaluasi yang menempatkan teori, aktor, sistem, dan bukti dalam hubungan yang saling menguatkan. Secara praktis, pembaca memperoleh panduan untuk meningkatkan kualitas perumusan hingga perbaikan kebijakan melalui evaluasi berbasis kinerja dan pembelajaran kebijakan. Secara akademik, buku layak dijadikan referensi karena memadukan tinjauan teoretis dengan orientasi penerapan, termasuk dalam konteks transformasi digital dan isu-isu publik yang berkembang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



USEP NUKLIRI, lahir di Sukamaju pada tanggal 12 September 1969 putra ke-tiga dari pasangan Bapak Raden H. Sofwan Dahyar dan Ibu Hj. Sutirah. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar Negeri Sukamaju Ogan Komering Ulu pada tahun 1983, Pendidikan Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rawabening Ogan Komering Ulu pada tahun 1987, Pendidikan Menengah Atas di Madrasah Aliyah (MA) Ibnu Hajar Bogor pada tahun 1990. Kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Laa-Roiba Bogor tahun 2000. Pada tahun 2020 menyelesaikan Pendidikan Pascasarjana Konsentrasi Magister Manajemen Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi *Indonesian School of Management* (STIE-ISM) Tangerang. Selanjutnya tahun 2025 menyelesaikan S3 Program Doktor Manajemen Pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor.

Profesi saat ini adalah sebagai Dosen dan sedang menjabat sebagai Rektor di Institut Agama Islam Bogor, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bogor dan sebagai Pembina Yayasan Cendekia Bogor. Aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan organisasi profesi. Pada saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Ketua Umum Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Kabupaten Bogor dan Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bogor.

Beberapa karya tulis jurnal dan buku telah dipublish yang terbaru terbit di tahun 2025 yaitu Jurnal Internasional dengan judul *"The Improving Organizational Commitment through Strengthening Digital Leadership, Personality, Team Effectiveness and Job Satisfaction"* dan buku yang berjudul *Sukses Mengelola PKBM di Era Digital "Integrasi Kepemimpinan, Kepribadian dan Efektivitas"*. Kemudian buku yang sedang dirilis ini merupakan buku ke 2 yang dipersembahkan untuk istri tercinta Hj. Eneng Badriah, S. Pd., MM dan putra-putri tercinta. Buku ini berjudul *Kebijaka Publik "Panduan Menjadi Pengambil Kebijakan yang Kompeten dan Bijaksana"*. Semoga buku ini bisa bermanfaat khususnya untuk pribadi, para aktivis dan akademisi yang fokus pada perkembangan kebijakan publik.

Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan pemahaman menyeluruh tentang kebijakan sebagai proses dan produk pemerintahan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Latar belakang pentingnya topik ini berangkat dari kompleksitas persoalan publik yang menuntut keputusan rasional, legitim, serta mampu diimplementasikan secara efektif. Buku ini bertujuan menjadi rujukan komprehensif bagi akademisi, mahasiswa (lanjutan), serta praktisi kebijakan yang memerlukan kerangka konseptual dan analitis untuk membaca, merancang, dan mengevaluasi kebijakan publik. Materi buku mencakup definisi, ruang lingkup, urgensi, serta konsep dasar proses kebijakan (Bab 1), kemudian diperdalam melalui teori rasional, teori incremental, dan pendekatan institusional serta perbandingannya (Bab 2). Selanjutnya buku menguraikan tahapan proses pengambilan kebijakan mulai dari identifikasi masalah hingga pengambilan keputusan dan peran komunikasi (Bab 3), aktor dan pemangku kepentingan (Bab 4), dinamika kekuasaan dan partisipasi (Bab 5), serta sistem dan infrastruktur kebijakan (Bab 6). Pada bagian analisis dan praktik, buku menyediakan kerangka analisis biaya-manafaat dan dampak, penggunaan data-bukti, serta tahapan implementasi, manajemen perubahan, hingga evaluasi formatif dan sumatif (Bab 7-10). Nilai tambahnya dipertegas oleh pembahasan kebijakan di era digital berbasis transparansi dan data besar, studi kasus lintas bidang, serta tantangan kontemporer dan proyeksi masa depan kebijakan (Bab 11-14).

Sebagai kontribusi utama, buku ini menawarkan satu alur logis dari konsep ke evaluasi yang menempatkan teori, aktor, sistem, dan bukti dalam hubungan yang saling menguatkan. Secara praktis, pembaca memperoleh panduan untuk meningkatkan kualitas perumusan hingga perbaikan kebijakan melalui evaluasi berbasis kinerja dan pembelajaran kebijakan. Secara akademik, buku layak dijadikan referensi karena memadukan tinjauan teoretis dengan orientasi penerapan, termasuk dalam konteks transformasi digital dan isu-isu publik yang berkembang.

